

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, yang pembangunannya terus mengalami perkembangan yang diwujudkan dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dimana terdapat banyak hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya yang datang dari berbagai aspek. Salah satu hambatannya adalah kesalahan dalam kebijakan pembangunan Indonesia selama ini adalah orientasi pembangunan yang selalu tertumpu pada daerah tertentu.

Pembangunan dalam bidang apapun, pada hakikatnya menghendaki terjadinya keseimbangan yang tercermin dalam konsep pemerataan pembangunan. Terkait dengan idealisasi pembangunan serta pelaksanaan pembangunan yang berimbang di daerah, maka diterbitkanlah UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang ini merupakan upaya untuk mendorong proses percepatan pembangunan daerah, oleh daerah itu sendiri dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

Pembangunan nasional Indonesia selama lima puluh tahun dikatakan cukup berhasil. Salah satu indikatornya adalah laju pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 6% setahun sejak 1969/1970 (Rais, 1995) padahal bukan aspek ekonomi saja yang ditinjau pada pembangunan nasional tetapi semakin berkurangnya daerah atau desa tertinggal di Indonesia. Daerah atau desa tertinggal

ini merupakan bagian terpenting dari pembangunan Indonesia karena dampaknya juga akan mencakup aspek ekonomi artinya ketika daerah ini diperhatikan dan dibangun tentunya akan memberikan kontribusi untuk daerah maupun wilayah.

Desa tertinggal adalah kondisi suatu wilayah yang potensi desa, keasaan penduduknya, keadaan perumahannya dan lingkungan pada umumnya masih perlu mendapat bantuan. (BPS,1994). Ada beberapa indikator masyarakat desa tertinggal menurut koentjaraningrat (1994), yaitu sumber kehidupan masyarakatnya tergantung pada alam, perilaku hidup sehat masih rendah, tingkat pengetahuan dan teknologi yang dimiliki masyarakat masih sangat terbatas, keterkaitan pada system nilai dan adat istiadat masih sangat tinggi sehingga cenderung bersikap tertutup.

Wilayah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya yang relatif terpencil. Miskin sumberdaya alam, atau rawan bencana alam. Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu wilayah lain di wilayah Negara. Wilayah tertinggal berada di wilayah pedesaan yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu seperti keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya alam, keterbatasan aksesibilitas ke pusat-pusat pemukiman lainnya ([www. Bapenas.go.id](http://www.Bapenas.go.id))

Hal tersebut menyebabkan kemiskinan serta kondisinya relatif tertinggal dari pedesaan lainnya dalam menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dan perkembangan peradaban. Pembangunan wilayah tertinggal berbeda dengan penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga melampaui garis kemiskinan. Pembangunan wilayah tertinggal juga bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, namun dengan fokus wilayah yang terisolir, tertinggal, terpencil dan masyarakatnya miskin. Pembangunan wilayah tertinggal merupakan isu pembangunan nasional, tidak hanya bagi negara-negara berpendapatan sedang atau menengah, namun juga bagi negara-negara berpendapatan tinggi. Suatu negara akan menghadapi ketidakstabilan sosial dan politik jika terdapat wilayah yang sangat jauh tertinggal dibandingkan wilayah-wilayah lainnya, walaupun tidak terdapat penduduk miskin di wilayah itu. Upaya penanggulangan kemiskinan dalam banyak hal sejalan dengan upaya pembangunan wilayah tertinggal, terutama di negara-negara berkembang.

Dari perspektif wilayah, kawasan yang merupakan kantong-kantong kemiskinan dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu: kawasan tertinggal dan kawasan terbelakang (Soetomo, 2006). Selanjutnya Soetomo menjelaskan, kawasan tertinggal adalah suatu wilayah yang cukup lama dikembangkan bersama-sama dengan wilayah yang lain tetapi karena berbagai sebab kawasan tersebut tetap belum dapat berkembang seperti yang diharapkan, sehingga kehidupan social ekonomi penduduknya tetap rendah. Salah satu penyebab utama karena terbatasnya potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Ada dua pandangan untuk menangani daerah tertinggal, pertama: pandangan yang dilandasi pertimbangan dan perhitungan ekonomis, yang menyarankan agar investasi dipusatkan pada wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi dengan alasan lebih cepat memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Gross National Product (GNP). Ke-dua: didasari pada pertimbangan social politik, yang merekomendasikan demi keadilan, investasi dilakukan tidak hanya untuk daerah yang berpotensi tinggi tetapi juga di daerah berpotensi sedang dan

rendah. Persoalan penduduk di daerah tertinggal bukan hanya persoalan lokal, akan tetapi merupakan persoalan bersama (nasional). Oleh karenanya, perlu perhatian berbagai pihak terkait Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memberdayakan dan mengembangkannya. Melalui upaya tersebut diharapkan secara bertahap masyarakat daerah tertinggal terentaskan dari ketertinggalannya. Dalam kerangka itu, identifikasi kebutuhan, sumberdaya, dan permasalahan masyarakat daerah tertinggal penting dilakukan. (Owens dalam Sutomo, 2006)

Daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan sempat ada kekhawatiran bahwa daerah-daerah kabupaten/kota akan mengalami gaya sentripetal dimana antar satu kecamatan dengan kecamatan lainnya yang dekat semakin dekat dan yang jauh semakin jauh. Pemekaran membawa implikasinya sendiri. Kini, dimasa pasca pemekaran keinginan untuk mengintegrasikan kembali kecamatan-kecamatan yang dulunya terpisah satu sama lain semakin dimungkinkan yang berjauhan semakin terasa lebih dekat. Kebutuhan pembukaan jalan baru dan realisasinya

semakin mendesak agar proses integrasi berbagai aspek di Tapanuli Bagian Selatan semakin terwujud.

Kecamatan Sipirok sekurang-kurangnya menunjukkan tiga desa yang berciri perkotaan (urban), yakni: Desa Pasar Sipirok, Desa Bagas Nagodang dan Desa Simaninggir. Desa ini diharapkan akan cepat berkembang dalam waktu dekat sehubungan dengan telah ditetapkannya ibukota Kabupaten Tapanuli berada di Sipirok. Penetapan ibukota tersebut secara defacto sehubungan dengan ditetapkannya Kota Padang Sidempuan sebagai daerah otonom pada waktu sebelumnya (2001) dan secara de jure dengan dimekarkannya Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni seiring terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara (UU RI No.37 Tahun 2007) dan Kabupaten Padang Lawas (UU RI No.38 Tahun 2007). Sementara Kota Sipirok sedang mulai menuju jati dirinya sebagai ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan yang baru, di pelosok kecamatan terdapat desa terpencil yang juga bagian dari 40 desa di Kecamatan Sipirok yang selama ini masih belum berkembang.

Desa Pargarutan, Desa barnang koling, Desa Panaungan, Desa bulu mario, Desa Pangaribuan, Desa batu satail, Desa ramba sihosur, Desa luat lombangdi Kecamatan Sipirok merupakan daerah yang sangat tertinggal dibandingkan daerah lain di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebagian besar modal transportasi masih menggunakan kuda, sebab infrastruktur jalan yang sangat buruk, kondisi jalan berbatu dan setelahnya adalah jalan tanah, sekitar 12 km jalan menuju desa paling ujung wilayah Kecamatan Sipirok masih berupa jalan tanah.

Jumlah penduduk desa-desa tertinggal ini pada dasarnya kurang lebih serupa dengan desa-desa lain di wilayah Tapanuli Bagian Selatan, berciri

penduduk sedikit (*small population*), cenderung pertumbuhannya lamban, karena masih adanya kecenderungan tradisi penduduk desa untuk melakukan perpindahan keluar desa (migrasi).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dikemukakan bahwa Lokasinya yang jauh dari jalan arteri pembangunan menjadi alasan struktural mengapa desa-desa tertinggal kecamatan sipirok ini kurang mendapat porsi yang seharusnya dalam pengalokasian dana pembangunan, misalnya dalam membangun dan membuka akses jalan ke desa-desa tertinggal. Jarak yang jauh dan sulitnya mencapai Kota Sipirok sebagai pusat fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lengkap dan pusat perdagangan menjadi faktor penting untuk meninggalkan desa. Apalagi di jaman sekarang ini di desa-desa tertinggal masih banyak keluarga yang tidak terjangkau listrik. Serta pengembangan sarana dan prasarana untuk yang mendukung kegiatan pemerintahan desa seperti kantor kepala desa dan balai desa, serta prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan masyarakat disana.

C. Pembatas Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka yang akan dikaji dan diteliti adalah upaya pengembangan desa tertinggal, mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan teliti untuk meneliti seluruh permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu membuat batasan masalahnya. Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada faktor – faktor penyebab terjadinya desa tertinggal dan keadaan prasarana yang mendukung kegiatan pemerintahan desa, kegiatan

ekonomi, fasilitas umum, kesehatan, kegiatan pendidikan, serta prasarana dan sarana yang mendukung transportasi dan komunikasi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang akan di teliti yaitu :

1. Faktor-faktor geografi apa saja yang menyebabkan terjadinya desa tertinggal di Kecamatan Sipirok ?
2. Bagaimana keadaan prasarana dan sarana desa tertinggal di Kecamatan Sipirok ?

E. Tujuan penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

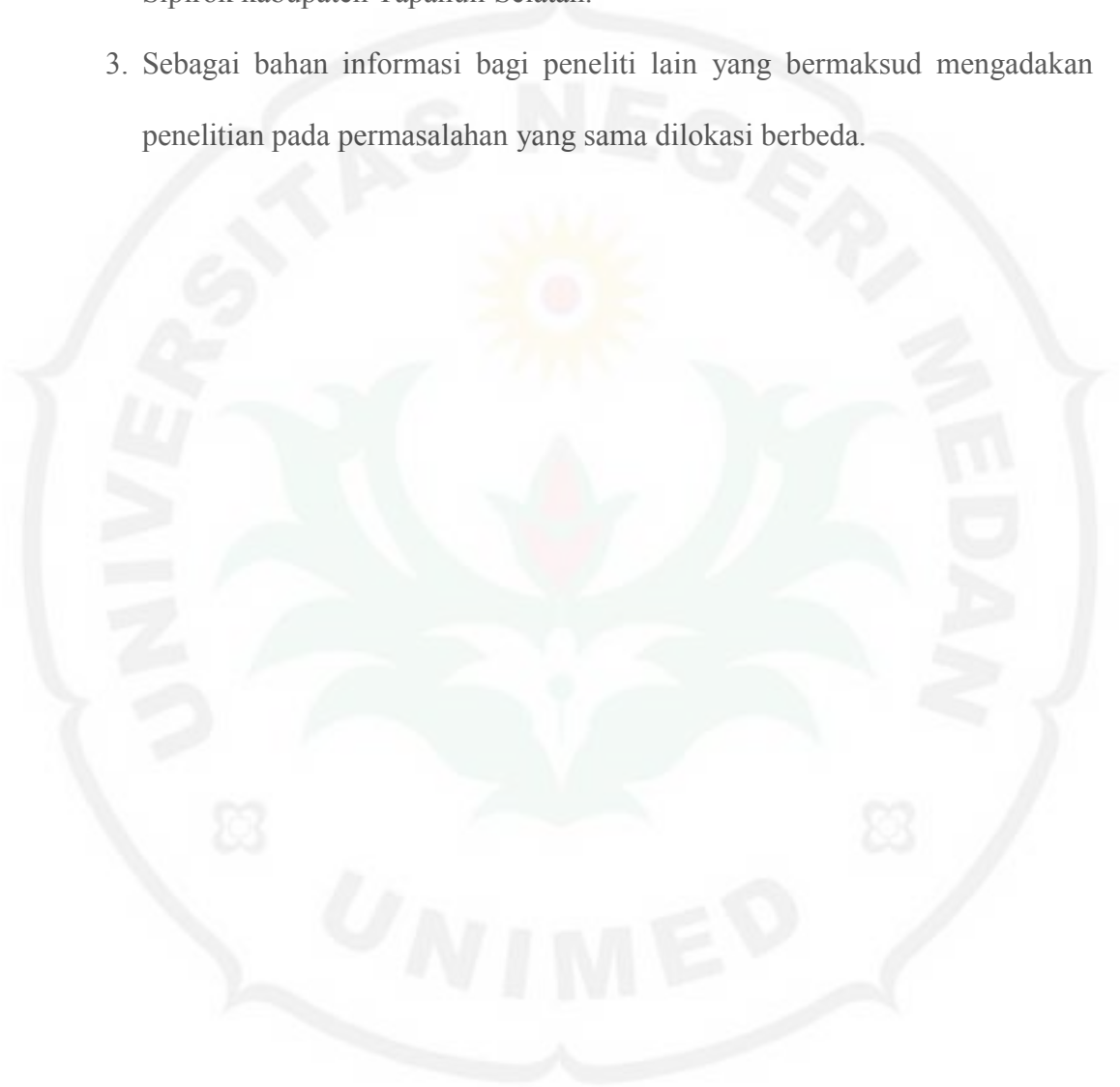
1. Penyebab terjadinya desa tertinggal di Kecamatan Sipirok
2. Keadaan prasarana dan sarana desa tertinggal di Kecamatan Sipirok

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli selatan khususnya para kepala desa tertinggal untuk meningkatkan perhatiannya dalam meningkatkan kemajuan masyarakat desa penelitian

2. Sebagai studi kajian pengembangan wilayah desa tertinggal dikecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian pada permasalahan yang sama dilokasi berbeda.



THE
Character Building
UNIVERSITY